

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Objek Penelitian

###### a. Gambaran Umum Indonesia

Indonesia berada antara 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur. Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara. Terhampar di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia melintasi dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, serta berbatasan dengan dua samudra utama, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keberadaan negara ini di antara dua samudra dan dua benua memberikan kekayaan alam yang melimpah, sekaligus memberikan ciri khas geografis yang unik.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki luas wilayah mencapai sekitar 1.904.443 km<sup>2</sup>, yang memiliki banyak pulau. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 278,8 juta jiwa, menunjukkan peningkatan sebesar 1,1% dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Peringkat ini menempatkan Indonesia di belakang negara-negara dengan populasi terbesar, yaitu India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Dinamika pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memberikan tantangan dan peluang bagi negara Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan letak geografisnya yang berada di sepanjang garis katulistiwa, Indonesia menjadi jalur utama bagi perdagangan internasional. Selain itu, negara ini dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk keanekaragaman hayati, kekayaan hewan, dan hasil tambang bumi.<sup>3</sup> Hal ini dapat menjadi

---

<sup>1</sup> Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Pelajar dan Umum* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2010), 7.

<sup>2</sup> Diajeng Sekar Seruni, Muhammad Tanzil Furqon, dan Randy Cahya Wihandika, "Sistem Prediksi Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Malang menggunakan Metode K-Nearest Neighbor Regression," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 4, no. 4 (April 2020): 1075–82, <http://j-ptiik.ub.ac.id>.

<sup>3</sup> Hannah Annisa dan Fatma Ulfatun Najicha, "Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian*

pendorong dalam pertumbuhan ekonomi. Posisi Indonesia berperan sebagai kunci dalam dinamika ekonomi global.

- b. Analisis Deskriptif
  - a) Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki standar hidup yang rendah dibandingkan dengan masyarakat setempat. Jadi dapat digolongkan sebagai penduduk miskin jika pengeluaran rata-rata perkapita perbulan dibawah standar kemiskinan.<sup>4</sup>

**Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2007-2022**

Tahun	Penduduk Miskin di Indonesia (%)
2007	16,58
2008	15,42
2009	14,15
2010	13,33
2011	12,49
2012	11,66
2013	11,47
2014	10,96
2015	11,13
2016	10,70
2017	10,12
2018	9,66
2019	9,22
2020	10,19
2021	9,71
2022	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah tahun 2023.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia kemiskinan tertinggi pada tahun 2007 yang mencapai 16,58%, sedangkan kemiskinan

---

*Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (3 Desember 2021): 8–14, <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>.

<sup>4</sup> Arfiani, *Berantas Kemiskinan*.

<sup>5</sup> <https://www.bps.go.id/id>

paling rendah pada tahun 2019 dengan persentase 9,22%. Indonesia mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 yang disebabkan adanya inflasi 4,03%, kenaikan harga BBM, dan turunnya upah buruh tani. Kenaikan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan yang meningkat hingga pada saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih diatas tahun 2019 pada saat sebelum adanya Covid-19.

b) IPM di Indonesia

IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, yang dinilai berdasarkan faktor-faktor seperti angka harapan hidup, tingkat melek huruf, durasi rata-rata pendidikan, dan daya beli. Angka harapan hidup digunakan sebagai parameter kesehatan, sementara tingkat melek huruf dan durasi rata-rata pendidikan dijadikan indikator pendidikan. Kemampuan daya beli digunakan sebagai metrik untuk menilai standar hidup.<sup>6</sup>

**Tabel 4.2 Persentase IPM di Indonesia Tahun 2007-2022**

Tahun	IPM (%)
2007	70,59
2008	71,17
2009	71,76
2010	66,53
2011	67,09
2012	67,70
2013	68,31
2014	68,90
2015	69,55
2016	70,18
2017	70,81
2018	71,39
2019	71,92
2020	71,94

<sup>6</sup> Sidabutar, Purba, Dan Panjaitan, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dankemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun.”

2021	72,29
2022	72,91

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah tahun 2023<sup>7</sup>

Berdasarkan tabel 4.2 Persentase IPM di Indonesia tahun 2007-2022 menunjukkan bahwa persentase IPM di Indonesia mulai tahun 2010 terus mengalami peningkatan dengan IPM terendah terjadi pada tahun 2010 yang hanya 66,53% dan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan persentase 72,91%.

c) Tenaga Kerja di Indonesia

Tenaga kerja merupakan seseorang yang memiliki kapabilitas untuk menjalankan tugas-tugas yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat secara umum. Keberadaan tenaga kerja memiliki potensi untuk memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, seiring dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja, akan meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan.<sup>8</sup>

**Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2022**

Tahun	Tenaga kerja (Jiwa)
2007	99.930.220
2008	102.552.750
2009	104.870.660
2010	108.207.770
2011	107.416.310
2012	112.504.870
2013	112.761.070
2014	114.628.030
2015	114.819.200
2016	118.411.970
2017	121.022.420
2018	126.282.190
2019	128.755.270
2020	128.454.180
2021	131.050.520

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/id>

<sup>8</sup> Banggolo, *Tenaga Kerja dan Pembangunan*.

2022	135.296.710
------	-------------

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah tahun 2023<sup>9</sup>

Berdasarkan tabel 4.3 Jumlah tenaga kerja di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja terendah pada tahun 2007 dengan jumlah tenaga kerja 99 ribu jiwa sedangkan jumlah tenaga kerja tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah tenaga kerja 135 ribu jiwa. Pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan menjadi 107 ribu karena adanya penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. Penurunan tenaga kerja juga terjadi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 128,4 ribu karena adanya pandemi covid-19.

d) ZIS di Indonesia

ZIS merupakan gabungan dari zakat, infaq dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak yang berhak menerima zakat. Infaq dan sedekah merupakan kegiatan sosial dalam agama Islam. Perbedaan sedekah lebih difokuskan pada pemberian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan sedangkan infaq lebih mengacu pada bentuk amal yang berupa memberikan harta atau benda yang dimiliki.<sup>10</sup>

**Tabel 4.4 ZIS di Indonesia Tahun 2007-2022**

Tahun	ZIS
2007	740.000.000.000
2008	920.000.000.000
2009	1.200.000.000.000
2010	1.500.164.240.975
2011	1.729.000.000.000
2012	2.212.000.000.000
2013	2.639.000.000.000
2014	3.300.000.000.000
2015	3.650.000.000.000
2016	5.017.290.000.000
2017	6.224.371.269.471

<sup>9</sup> <https://www.bps.go.id/id>

<sup>10</sup> Ipmawati dan Widiastuti, “Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan Di Lazismu Kota Surabaya.”

2018	8.117.597.683.267
2019	10.227.943.806.555
2020	12.510.541.907.699
2021	14.222.002.607.119
2022	22.475.655.478.672

Sumber : BAZNAZ diolah tahun 2023<sup>11</sup>

[s://baznas.go.id/laporan-zakat-](https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional)

[nasional](https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional) Berdasarkan tabel 4.4 ZIS di Indonesia tahun 2007-2022 menunjukkan bahwa ZIS di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan jumlah ZIS terendah pada tahun 2007 yang hanya mencapai 740 miliar dan ZIS tertinggi pada tahun 2022 yang dapat mencapai hingga 22 triliun. Pada tahun 2022 ZIS di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

e) Pendapatan di Indonesia

Pendapatan merupakan merupakan alat untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Pendapatan yang biasa digunakan untuk mengukur kesejahteraan rakyat yaitu pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk perkapita.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>

<sup>12</sup> Sihite, “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Konsumsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.”

**Tabel 4.5 Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun  
2007-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Perkapita</b>
2007	17.600.000
2008	21.700.000
2009	24.300.000
2010	27.000.000
2011	30.800.000
2012	33.300.000
2013	36.500.000
2014	41.800.000
2015	45.200.000
2016	47.960.000
2017	51.890.000
2018	56.000.000
2019	59.000.000
2020	56.900.000
2021	62.200.000
2022	71.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah tahun 2023<sup>13</sup>

Berdasarkan tabel 4.5 Pendapatan Perkapita di Indonesia tahun 2007-2022 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Indonesia terendah pada tahun 2007 yang hanya 17,6 juta dan tertinggi pada tahun 2022 yang mencapai 71 juta. Pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan perekonomian di dunia.

## 2. Analisis Data

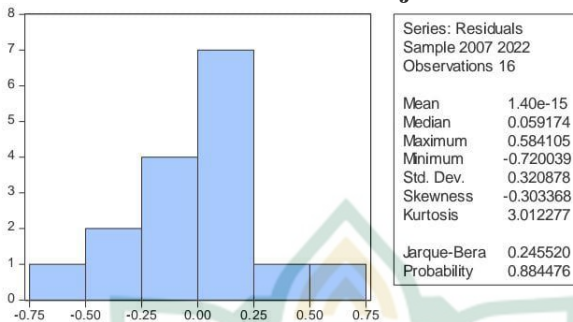
### a. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu teknik yang diaplikasikan guna mengidentifikasi apakah suatu data terbentuk dari populasi dengan distribusi normal atau tidak. Cara sederhana menentukan residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 0,05 (5%). Residual terdistribusi normal jika nilai Probabilitas JB hitung lebih besar

<sup>13</sup> <https://www.bps.go.id/id>

dari 0,05. Sebaliknya, residual tidak berdistribusi normal apabila nilai JB hitung kurang dari 0,05.<sup>14</sup>

**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Eviews 9 yang diolah tahun 2023

Pada pengujian normalitas menggunakan JarqueBerra terlihat dari gambar bahwa nilai probabilitas Jarque-Berra 0.884476, yang mana lebih tinggi dari pada tingkat signifikansi yang diaplikasikan ( $\alpha = 5\%$ ). Dapat dikatakan bahwa data yang diaplikasikan berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas diaplikasikan guna menentukan apakah terdapat kemiripan atau keterkaitan antara variabel independen dalam suatu model, yang dapat mengakibatkan korelasi yang tinggi di antara variabel tersebut. Pengambilan keputusan dapat diketahui pada nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF di bawah nilai 10, maka dapat diasumsikan tidak terjadi gejala multikolinieritas.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*.

<sup>15</sup> Ilyas Junjuran dan Tita Nawangsari, *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eviews Dalam Penelitian Bisnis*.



**Gambar 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	61.32937	6988.909	NA
IPM	0.004424	2485.337	1.830108
Tenaga Kerja	4.16E-15	6506.881	52.41995
ZIS	1.88E-27	15.31009	7.480754
Pendapatan	1.61E-15	377.7561	44.23908

Sumber : Eviews 9 yang diolah tahun 2023

Dari data yang terdapat dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa nilai Centered Variance Inflation Factor (VIF) pada X1 dan X3 berada di bawah 10, menunjukkan ketiadaan gejala multikolinearitas. Namun, pada X2 dan Z, nilai VIF lebih dari 10.00, menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas. Fenomena ini mungkin terjadi dalam penggunaan Regresi dengan Moderated Regression Analysis (MRA), terutama ketika terdapat korelasi antara variabel moderating dan variabel independen.<sup>16</sup> Dapat diakui bahwa pernyataan ini sejalan dengan temuan Liana, yang menyatakan bahwa penggunaan Regresi dengan MRA cenderung menimbulkan masalah multikolinearitas akibat adanya korelasi antara variabel independen dan moderating. Hubungan multikolinearitas lebih dari 80% menyebabkan masalah regresi.<sup>17</sup> Nazaruddin dan Basuki dalam penelitian Dhea Ayu Rosita Putri menyatakan bahwa meskipun masalah multikolinearitas mungkin timbul, namun bukan masalah yang serius, terutama jika tujuan penelitian hanya untuk mengeksplorasi respons variabel moderasi terhadap hubungan variabel independen dan dependen.<sup>18</sup> Temuan lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Dimas Prianggono, menunjukkan bahwa dalam penelitian dengan model regresi dan variabel moderasi, kemungkinan

<sup>16</sup> Rianto Rahadi dan Farid, *Monograf Analisis Variabel Moderating*.

<sup>17</sup> Lie Liana, "Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen," 2009, 90-97.

<sup>18</sup> Dhea Ayu Rosita Putri, "Pengaruh Asimetri Informasi Dan Mandatory Disclosure Terhadap Relevansi Nilai Informasi Laba Dan Nilai Buku (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016)," *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2018, 39.

besar akan muncul masalah multikolinearitas.<sup>19</sup> Pengakuan Vania Afinda Hadi, dalam uji asumsi klasik, uji multikolinearitas diabaikan karena adanya variabel moderasi.<sup>20</sup>

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas diaplikasikan guna menguji apakah model regresi memiliki varian residual yang sama untuk memutuskan apakah model tersebut mengalami masalah heterokedastisitas atau tidak, dapat diamati dari nilai probabilitas. Dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05), dan sebaliknya jika probabilitas nilainya di bawah 0,05 maka terjadi indikasi heteroskedastisitas.<sup>21</sup>

**Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.821665	Prob. F(4,11)	0.0779
Obs*R-squared	8.102899	Prob. Chi-Square(4)	0.0879
Scaled explained SS	5.161971	Prob. Chi-Square(4)	0.2711

Sumber : Eviews 9 yang diolah tahun 2023

Pada tabel diatas, uji heterokedastisitas menghasilkan nilai Prob. ChiSquare sebesar 0.0879 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Data variabel model pada riset ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

**d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi berguna untuk memeriksa apakah residual suatu pengamatan berkorelasi dengan pengamatan lain dalam model. Pada penelitian ini diaplikasikan uji autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test. Nilai p-value digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam uji LM Test. Jika nilai signifikansi dari uji LM Test lebih besar dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Di sisi lain, terdapat

<sup>19</sup> Dimas Prianggono, *Pengaruh Solvabilitas, Opini Audit, dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderas* (Jakarta: Univaersitas Trisakti, 2018), 66.

<sup>20</sup> Vania Afinda Hadi, *Pengaruh koneksi politik dan related party transaction terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel moderasi* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2022), 60.

<sup>21</sup> Ilyas Junjuran dan Tita Nawangsari, *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eviews Dalam Penelitian Bisnis*.

kemungkinan terindikasi autokorelasi jika nilai signifikansi uji LM test kurang dari 0.05.<sup>22</sup>

**Gambar 4.4 Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.026023	Prob. F(2,9)	0.3968
Obs*R-squared	2.970738	Prob. Chi-Square(2)	0.2264

Sumber : Eviews 9 yang diolah tahun 2023

Pada tabel di atas nilai prob. Chi-Square sebesar 0.2264 yang berarti lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Hal ini berarti riset ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

**e. Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Analisis regresi ini memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen.<sup>23</sup>

**Gambar 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.25050	7.099122	4.542886	0.0007
X1	0.224749	0.086672	2.593104	0.0235
X2	-3.24E-07	2.85E-08	-11.34851	0.0000
X3	2.29E-13	5.63E-14	4.074639	0.0015

Sumber : Eviews 9 yang diolah tahun 2023

Dari hasil estimasi model data time series dapat disimpulkan bahwa uji regresi liner berganda yang telah diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 32.25050 + 0.224749 \text{ IPM} - 3.24\text{E}07 \text{ Tenaga Kerja} + 2.29\text{E-}13 \text{ ZIS.}$$

- a. Berdasarkan pada tabel diatas maka nilai a (konstanta) adalah 32.25050 dan memiliki  $R_h$  koefisien regresi positif artinya apabila nilai variabel IPM, Tenaga Kerja, dan ZIS sama dengan 0 maka nilai awal tingkat kemiskinan adalah 32.25050.
- b. Berdasarkan tabel diatas nilai b1 sebesar 0.224749 yang berarti ada efek positif antara IPM terhadap kemiskinan. apabila

<sup>22</sup> Aditya, Asmoro Kanthi, dan Aminah, *Metodologi Penelitian dalam Disiplin Ilmu Sistem Informasi*.

<sup>23</sup> *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

- variabel IPM naik 1 maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan 0.224749 dengan syarat tidak terdapat variabel lainnya.
- c. Berdasarkan tabel diatas nilai b2 sebesar  $-3.24E-07$  ( $-0,000000324$ ) yang berarti ada pengaruh negatif antara Tenaga Kerja terhadap kemiskinan. apabila variabel Tenaga Kerja naik 1 maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan  $-3.24E-07$  ( $-0,000000324$ ) dengan syarat tidak terdapat variabel lainnya.
  - d. Berdasarkan tabel diatas nilai b3 sebesar  $2.29E-13$  ( $0,000000000000229$ ) yang berarti ada efek positif antara ZIS terhadap kemiskinan. apabila variabel ZIS naik 1 maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan  $2.29E-13$  ( $0,000000000000229$ ) dengan syarat tidak terdapat variabel lainnya.

**f. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F diaplikasikan huna mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara simultan (keseluruhan) mempengaruhi variabel dependen.<sup>24</sup>

**Gambar 4. 6 Hasil Uji F**

R-squared	0.960324	Mean dependent var	11.64750
Adjusted R-squared	0.950405	S.D. dependent var	2.197039
S.E. of regression	0.489279	Akaike info criterion	1.620549
Sum squared resid	2.872724	Schwarz criterion	1.813696
Log likelihood	-8.964391	Hannan-Quinn criter.	1.630440
F-statistic	96.81680	Durbin-Watson stat	2.123943
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews yang diolah tahun 2023

Hasil uji F terlihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah 96.81 dan  $F_{tabel}$  dengan tingkat  $\alpha = 5\%$  adalah 2,76. Sehingga dinyatakan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $96,81 > 2,76$ ) dan nilai probabilitasnya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel IPM, Tenaga kerja dan ZIS secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan

<sup>24</sup> Ilyas Junjuran dan Tita Nawangsari, *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eviews Dalam Penelitian Bisnis*.

terhadap kemiskinan, sehingga variabel dependen dapat diprediksi dengan menggunakan model regresi.

**g. Determinasi R<sup>2</sup>**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) diaplikasikan guna mengevaluasi tingkat akurat garis regresi yang dibentuk untuk mempresentasikan data hasil pengamatan. Koefisien determinasi mencerminkan sejauh mana persentase variasi total data yang bisa diuraikan oleh model regresi. Semakin tinggi nilai R<sup>2</sup> (medekati 1), menunjukkan keakuratan yang optimal dalam menjelaskan variasi data.<sup>25</sup>

**Gambar 4.7 Hasil Uji Determinasi R<sup>2</sup>**

R-squared	0.960324	Mean dependent var	11.64750
Adjusted R-squared	0.950405	S.D. dependent var	2.197039
S.E. of regression	0.489279	Akaike info criterion	1.620549
Sum squared resid	2.872724	Schwarz criterion	1.813696
Log likelihood	-8.964391	Hannan-Quinn criter.	1.630440
F-statistic	96.81680	Durbin-Watson stat	2.123943
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Eviews 9 yang diolah tahun 2023

Dari hasil tabel, terlihat bahwa koefisiensi determinasi model regresi pada adjusted R<sup>2</sup> yaitu 0.950405. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang diaplikasikan pada penelitian mampu menjelaskan sebesar 95,04% pada variabel ini memiliki kontribusi 95,04%. Sisanya 4,96% dipengaruhi oleh faktor yang tidak termasuk dalam model regresi tersebut.

**h. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t memiliki tujuan untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 serta t hitung > t tabel, maka H0 ditolak serta Ha diterima.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Bawono dan Fendha Ibnu Shina, *Ekonometrika Terapan untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews dalam Penelitian Bisnis*.

<sup>26</sup> Ilyas Junjuran dan Tita Nawangsari, *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eviews Dalam Penelitian Bisnis*.

**Gambar 4.8 Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.25050	7.099122	4.542886	0.0007
X1	0.224749	0.086672	2.593104	0.0235
X2	-3.24E-07	2.85E-08	-11.34851	0.0000
X3	2.29E-13	5.63E-14	4.074639	0.0015

Sumber : Eviews 9 yang diolah tahun 2023

- a. Pengaruh IPM (X1) terhadap Kemiskinan (Y) Hasil uji t pada variabel IPM mempunyai probabilitas 0.0235 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, dan nilai t hitung 2.593104 lebih besar dari pada nilai t tabel 2.001. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b. Pengaruh Tenaga Kerja (X2) terhadap Kemiskinan (Y) Hasil uji t pada variabel tenaga kerja memiliki probabilitas 0.0000 yang berarti lebih kecil dari 0.05. selain itu, nilai t hitung - 11.34851 lebih besar dari pada t tabel 2.001, hal ini dapat dikatakan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.
- c. Pengaruh ZIS (X3) terhadap Kemiskinan (Y) Hasil uji t pada variabel ZIS memiliki probabilitas 0.0015 yang berarti lebih kecil dari 0.05, dan nilai t hitung 4.074639 lebih besar dari pada t tabel 2.001, hal ini dapat dikatakan bahwa variabel ZIS berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kemiskinan. Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.

**i. MRA**

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi adalah penerapan khusus dari regresi linear berganda, di mana persamaan regresinya melibatkan unsur interaksi, seperti perkalian dua atau lebih variabel independen.<sup>27</sup>

**Gambar 4. 9 Hasil Uji Moderating (MRA)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.10220	30.07079	1.865671	0.0991

<sup>27</sup> Rianto Rahadi dan Farid, *Monograf Analisis Variabel Moderating*.

X1	0.082842	0.439730	0.188392	0.8553
X2	-4.38E-07	1.17E-07	-3.750200	0.0056
X3	7.01E-13	3.07E-13	2.283815	0.0518
Z	-5.81E-07	9.25E-07	-0.627951	0.5475
M1	-8.19E-10	1.63E-08	-0.050195	0.9612
M2	5.22E-15	2.68E-15	1.945179	0.0876
M3	-8.57E-21	3.87E-21	-2.212389	0.0579

Sumber: Eviews 9 yang diolah tahun 2023

1. Variabel M1 (interaksi antara variabel X1 dengan variabel moderasi) memiliki nilai t-statistic sebesar -0.050 dengan nilai prob signifikansi 0.9612 > 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan tidak dapat memoderasi IPM dengan Kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  ditolak dan  $H_0$  diterima.
2. Variabel M2 (interaksi antara variabel X2 dengan variabel moderasi) memiliki nilai t-statistic sebesar 1.945 dengan nilai prob signifikansi 0.0876 > 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan tidak dapat memoderasi tenaga kerja dengan Kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  ditolak dan  $H_0$  diterima.
3. Variabel M3 (interaksi antara variabel X3 dengan variabel moderasi) memiliki nilai t-statistic sebesar -2.212 dengan nilai prob signifikansi 0.0579 > 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan tidak dapat memoderasi ZIS dengan Kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_6$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

**j. Uji F dengan menggunakan moderating**

Uji F diaplikasikan guna mengetahui apakah seluruh variabel secara bersama-sama (simultan) berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka dapat dikatakan bahwa variabel secara simultan (keseluruhan) mempengaruhi variabel dependen.<sup>28</sup>

**Gambar 4. 10 Uji F dengan menggunakan moderating**

R-squared	0.990165	Mean dependent var	11.64750
Adjusted R-squared	0.981558	S.D. dependent var	2.197039
S.E. of regression	0.298357	Akaike info criterion	0.725800
Sum squared resid	0.712134	Schwarz criterion	1.112094

<sup>28</sup> Ilyas Junjuran dan Tita Nawangsari, *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eviews Dalam Penelitian Bisnis*.

Log likelihood	2.193602	Hannan-Quinn criter.	0.745581
F-statistic	115.0546	Durbin-Watson stat	2.869011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews yang diolah tahun 2023

Hasil uji F terlihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah 115.05 dan  $F_{tabel}$  dengan tingkat  $\alpha = 5\%$  adalah 2,50. Sehingga dinyatakan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $115.05 > 2.50$ ) dan nilai probabilitasnya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel IPM, Tenaga kerja, ZIS, pendapatan sebagai variabel moderasi, interaksi variabel IPM dengan variabel moderasi (M1), interaksi variabel tenaga kerja dengan variabel moderasi (M2), dan interaksi variabel ZIS dengan moderasi (M3) secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

**k. Uji  $R^2$  dengan menggunakan moderating**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) diaplikasikan guna mengevaluasi tingkat akurat garis regresi yang dibentuk untuk mempresentasikan data hasil pengamatan. Koefisien determinasi mencerminkan sejauh mana persentase variasi total data yang bisa diuraikan oleh model regresi. Semakin tinggi nilai  $R^2$  (medekati 1), menunjukkan keakuratan yang optimal dalam menjelaskan variasi data.<sup>29</sup>

**Gambar 4. 11 Uji  $R^2$  dengan menggunakan moderating**

R-squared	0.990165	Mean dependent var	11.64750
Adjusted R-squared	0.981558	S.D. dependent var	2.197039
S.E. of regression	0.298357	Akaike info criterion	0.725800
Sum squared resid	0.712134	Schwarz criterion	1.112094
Log likelihood	2.193602	Hannan-Quinn criter.	0.745581
F-statistic	115.0546	Durbin-Watson stat	2.869011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 9 yang diolah tahun 2023

Dari hasil tabel, terlihat bahwa koefisiensi determinasi model regresi pada adjusted  $R^2$  yaitu 0.981558. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel yang diaplikasikan pada penelitian mampu menjelaskan sebesar 98,15% pada variabel ini memiliki

<sup>29</sup> Bawono dan Fendha Ibnu Shina, *Ekonometrika Terapan untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews dalam Penelitian Bisnis*.



kontribusi 98,15%. Sisanya 1,85% dipengaruhi oleh faktor yang tidak termasuk dalam model regresi tersebut.

#### 1. Uji t dengan menggunakan moderating

Uji t memiliki tujuan untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel moderasi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 serta  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima.<sup>30</sup>

**Gambar 4. 12 Uji t dengan menggunakan moderating**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.10220	30.07079	1.865671	0.0991
X1	0.082842	0.439730	0.188392	0.8553
X2	-4.38E-07	1.17E-07	-3.750200	0.0056
X3	7.01E-13	3.07E-13	2.283815	0.0518
Z	-5.81E-07	9.25E-07	-0.627951	0.5475
M1	-8.19E-10	1.63E-08	-0.050195	0.9612
M2	5.22E-15	2.68E-15	1.945179	0.0876
M3	-8.57E-21	3.87E-21	-2.212389	0.0579

Sumber: Eviews 9 yang diolah tahun 2023

- Pengaruh pendapatan memoderasi IPM terhadap kemiskinan. Hasil uji t pada variabel M1 mempunyai probabilitas 0.0961 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05, dan nilai t hitung -0.050195 lebih kecil dari pada nilai t tabel 1.994. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pendapatan tidak dapat memoderasi IPM terhadap kemiskinan (Y). Artinya  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak.
- Pengaruh pendapatan memoderasi Tenaga Kerja terhadap kemiskinan. Hasil uji t pada variabel M2 mempunyai probabilitas 0.0876 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05, dan nilai t hitung 1.945179 lebih kecil dari pada nilai t tabel 1.994. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pendapatan tidak dapat memoderasi tenaga kerja terhadap kemiskinan (Y). Artinya  $H_0$  diterima dan  $H_5$  ditolak.
- Pengaruh pendapatan memoderasi ZIS terhadap kemiskinan. Hasil uji t pada variabel M3 mempunyai probabilitas 0.0579 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05,

<sup>30</sup> Ilyas Junjuran dan Tita Nawangsari, *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eviews Dalam Penelitian Bisnis*.

dan nilai t hitung  $-2.212389$  lebih kecil dari pada nilai t tabel  $1.994$ . Hal ini dapat dikatakan bahwa Pendapatan tidak dapat memoderasi ZIS terhadap kemiskinan (Y). Artinya  $H_0$  diterima dan  $H_6$  ditolak.

**m. Hasil penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan hasil hipotesis yang telah dirangkum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 6 Rangkuman hasil penelitian**

	<b>Hipotesis</b>	<b>Hasil</b>
$H_1$	IPM berpengaruh terhadap Kemiskinan	Diterima
$H_2$	Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Kemiskinan	Diterima
$H_3$	ZIS berpengaruh terhadap Kemiskinan	Diterima
$H_4$	Pendapatan mampu memoderasi IPM terhadap Kemiskinan	Ditolak
$H_5$	Pendapatan mampu memoderasi Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan	Ditolak
$H_6$	Pendapatan mampu memoderasi ZIS terhadap Kemiskinan	Ditolak

**B. Pembahasan Hasil Penelitian**

**1. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2022**

Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2022 secara parsial diperoleh hasil nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu dengan nilai  $2.593 > 2.001$  dan dengan nilai signifikansi kurang dari  $0.05$  yaitu  $0.023$  ( $0.05 > 0.023$ ) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dengan maksud IPM dengan melalui uji t berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. IPM yang berpengaruh positif dan signifikan dikarenakan adanya ketimpangan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ema Dian Ristika yang membuktikan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh indeks pembangunan manusia; jika indeks tersebut meningkat, tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Laporan Pembangunan Manusia yang dirilis oleh Program Pembangunan Dunia (UNDP) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia belum memberikan manfaat kepada seluruh masyarakatnya. Ini menyebabkan perbedaan, yang berdampak tidak merata pada area

tertentu.<sup>31</sup> Suryani, Sintaini Fi Sholiha, dkk mengungkapkan bahwa IPM yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pemerintah dapat melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan melakukan pembangunan manusia atau meningkatkan sumber daya manusia agar lebih berkualitas.<sup>32</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Bhawika Dharmmayukti Tri Oldy Rotinsulu dan Audie O Niode menunjukkan indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan meski IPM menjadi indikator pembangunan negara tetapi dengan tingginya indeks pembangunan manusia dapat mengakibatkan tidak meratanya pembangunan sehingga menyebabkan ketimpangan di suatu daerah.<sup>33</sup>

Teori neo-liberal menekankan pada peran pasar bebas dan pengurangan campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan, pendekatan neoliberal dapat mengandaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pasar bebas dapat meningkatkan IPM dan pada gilirannya mengurangi tingkat kemiskinan.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan seringkali dapat terkait dengan ketidakmerataan pembangunan yang ada di beberapa daerah. Pembangunan yang belum merata dapat menciptakan ketidaksetaraan antar wilayah, terdapat beberapa daerah yang mungkin sulit untuk dijangkau dan mengalami keterbelakangan. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan dapat memberikan kontribusi pada ketidaksetaraan ini.

Daerah yang sulit dijangkau mungkin memiliki akses terbatas terhadap peluang ekonomi dan sumber daya, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

---

<sup>31</sup> Ristika, Primandhana, dan Wahed, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.”

<sup>32</sup> Suryani dkk., “Pengaruh Ipm Dan Pdrb Terhadap Jumlah Penduduk Ekonomi Tingkat Rendah (Miskin) Di Sumatera Utara,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (Maret 2023): 1–12.

<sup>33</sup> Bhawika Dharmmayukti, “Analisis Pengaruh Inflasi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2019” 21, no. 05 (2021).

kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini dapat tercermin dalam perbedaan signifikan antara tingkat IPM di daerah yang mudah dijangkau dan daerah yang sulit dijangkau.

Pihak pemerintah segera melakukan pembangunan yang menerapkan strategi kebijakan lebih terfokus pada pengurangan ketidaksetaraan antar daerah, seperti mendesain program pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk daerah yang sulit dijangkau. Pembuatan kebijakan dapat digunakan untuk mengembangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan dan mengurangi ketimpangan regional dalam mencapai tujuan peningkatan IPM dan pengurangan kemiskinan.

Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seharusnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, namun jika terjadi kenaikan IPM bersamaan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, implikasinya dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan. Faktor-faktor seperti alokasi sumber daya yang tidak merata atau kebijakan pembangunan yang tidak inklusif mungkin perlu dievaluasi untuk memahami lebih lanjut penyebab kemiskinan yang tetap tinggi.

## **2. Pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2022**

Tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2022 secara parsial menunjukkan hasil bahwa nilai thitung lebih besar dari tabel dengan arah negatif yaitu dengan nilai -11.34851 lebih besar dari tabel -2.001 serta dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05 yaitu dengan nilai probabilitas 0.0000 lebih kecil dari 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis dapat diterima. Tenaga kerja yang meningkat dapat menjadikan masyarakat yang memiliki pendapatan meningkat sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lufi Supratyoningasih dan Ni Nyoman Yuliarmi yang menunjukkan hasil tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga tingkat kemiskinan dapat dikurangi jika ada peningkatan tenaga kerja. Selain sumber daya alam dan teknologi, sumber daya manusia adalah komponen pendukung utama yang dapat digunakan untuk menentukan proses

pembangunan. Kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan, yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.<sup>34</sup>

Rahma Aprilia dan Retno Sugiharti menyatakan dalam jangka panjang setiap kenaikan jumlah tenaga kerja dapat mengurangi persentase kemiskinan sehingga dapat dilakukan pelatihan yang mendukung agar kualitas yang dihasilkan dari tenaga kerja dapat meningkat dan dapat terus berkontribusi dalam penurunan kemiskinan di Indonesia.<sup>35</sup>

Adelia Wahyu Apriliana dan Wiwin Priana Primandhana mengungkapkan jika penurunan persentase kemiskinan tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja, kualitas lapangan kerja harus diperbaiki. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan tingkat upah karyawan atau dengan memberikan jaminan sosial kepada karyawan. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin banyak orang yang memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah penduduk miskin dapat diatasi jika banyak masyarakat yang bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya hingga keadannya berada diatas garis kemiskinan sehingga persentase kemiskinan di Indonesia dapat menurun.<sup>36</sup>

Teori neo-liberal menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dapat berkurang dengan memperluas kekuatan pasar. Teori neo-liberal percaya dengan mekanisme pasar kemiskinan dan ketidakadilan sosial dapat diatasi. Tenaga kerja merupakan salah satu mekanisme pasar yang harus ditingkatkan agar kemiskinan dapat mengalami penurunan.

Tenaga kerja yang mengalami peningkatan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada saat jumlah tenaga kerja meningkat, terdapat potensi peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan jumlah pekerja dapat menciptakan lapangan kerja baru, memberikan kesempatan ekonomi bagi lebih banyak individu, dan meningkatkan daya beli

---

<sup>34</sup> Supratyoningsih dan Yuliarmi, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali.”

<sup>35</sup> Aprilia dan Sugiharti, “Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kesehatan terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Provinsi Bali).”

<sup>36</sup> Apriliana dan Primandhana, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur.”

masyarakat. Meningkatnya pendapatan dapat menyebabkan kemungkinan besar akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

Faktor utama dalam hubungan ini adalah bahwa peningkatan tenaga kerja seringkali diikuti oleh pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dalam hal pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat yang lebih besar terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat mempertimbangkan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja dapat diarahkan untuk menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di tingkat nasional.

Kenaikan tenaga kerja yang diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan dapat mencerminkan adanya hubungan yang baik antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Implikasinya adalah bahwa kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja dapat efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, perlu diperhatikan kualitas pekerjaan, gaji yang layak, dan akses pendidikan untuk memastikan bahwa peningkatan tenaga kerja memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

### **3. Pengaruh ZIS terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2022**

Zakat Infaq Sedekah (ZIS) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2022 secara parsial dengan melalui uji t statistik mendapatkan hasil thitung lebih besar dari ttabel dengan nilai 4.074639 lebih besar dari t tabel 2.001 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dengan nilai probabilitas 0.0015. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima dengan maksud ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. ZIS yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan dikarenakan penyaluran dan ZIS belum tepat sasaran sehingga dapat mengakibatkan kemiskinan tidak menurun serta penggunaan dana zakat bersifat konsumtif sehingga hanya berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Gondo Saputro yang menghasilkan penelitian

ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. sehingga dapat dikatakan dalam penyaluran ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pembedayaan ekonomi belum sepenuhnya dapat menurunkan persentase kemiskinan namun justru malah sebaliknya. Penggunaan dana zakat bersifat konsumtif, hanya berdampak pada daya beli masyarakat, dana ZIS tidak dapat menurunkan garis kemiskinan dan penduduk miskin sehingga dapat dikatakan bahwa ZIS belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan bahkan memiliki potensi meningkatnya kemiskinan.<sup>37</sup> Baiyyatin Nafi'ah mengatakan ketaatan dalam membayar zakat dapat berlangsung secara komprehensif. Zakat dapat dijadikan sebagai potensi untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat dan zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program meningkatkan sumber daya manusia.<sup>38</sup> Khoiril Tamimi dan Ahmad Muhaisin B Syarbaini menyatakan pemerintah dan BAZNAS perlu memberikan perhatian yang lebih serius dalam pengembangan dan penyaluran bantuan dana zakat infaq dan sedekah di Indonesia karena penyaluran dana ZIS dapat membantu masyarakat yang berhak menerima ZIS.<sup>39</sup>

Penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Namun, ZIS hanya bersifat konsumtif, yang berarti bahwa penyaluran dana ini tidak efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Meskipun ZIS dapat membantu meringankan beban sebagian orang miskin, tetapi dampaknya tidak signifikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan penyaluran dana ZIS dan memperkuat pertumbuhan ekonomi agar dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Eko Gondo Saputro, *Pengaruh Zakat Infaq Shadaqah (Zis) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Studi Kasus Baitul Mal Aceh* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 122-123.

<sup>38</sup> nafi'ah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)."

<sup>39</sup> Khoiril Tamimi dan Ahmad Muhaisin B Syarbaini, "Analisis interaksi dan kontribusi zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan Islamic human development index (I-HDI) terhadap kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 19, no. 3 (2023): 678–88.

<sup>40</sup> Ainun Awaliah, Rahmawati Muin, dan Trisno Wardy Putra, "Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan

ZIS bersifat konsumtif berarti bahwa dana yang diberikan melalui ZIS cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini berbeda dengan dana investasi atau dana produktif yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan jangka panjang. Meskipun ZIS memiliki tujuan mulia untuk membantu orang yang membutuhkan, namun jika tidak dikelola dengan baik, dana ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Pemerintah perlu menerapkan lebih banyak program ZIS selain yang bersifat konsumtif, pemerintah dapat mendorong penggunaan dana ZIS secara produktif. Dana ZIS dapat digunakan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, seperti memberikan modal usaha kepada mustahiq agar mereka dapat mandiri secara finansial. Sehingga ZIS tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dapat menurunkan kemiskinan dalam jangka panjang.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan program-program yang bersifat produktif untuk mengatasi kemiskinan secara lebih efektif. Program-program ini harus didesain untuk memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan lainnya yang memungkinkan penerima ZIS untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan fokus pada ZIS yang produktif, dana ZIS dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan perubahan jangka panjang dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

#### **4. Pendapatan memoderasi IPM terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2022**

Pendapatan memoderasi IPM terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2022 dengan melalui uji MRA menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hasil uji MRA nilai variabel interaksi 0.9612 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, pendapatan tidak dapat memoderasi hubungan IPM terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robiansyah menunjukkan hasil bahwa pendapatan perkapita tidak dapat memoderasi hubungan



pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.<sup>41</sup> Penelitian Robiansyah didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Bhupendra Badgaiyan menunjukkan hasil bahwa pendapatan tidak dapat memoderasi hubungan IPM terhadap Kemiskinan.<sup>42</sup>

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan di Indonesia. Namun, pendapatan bukanlah faktor tunggal yang menentukan. Terdapat berbagai aspek lain yang berkontribusi terhadap IPM dan penurunan tingkat kemiskinan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kondisi hidup yang layak. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan saja tidak cukup untuk secara signifikan memoderasi hubungan antara IPM dan kemiskinan.<sup>43</sup> Karena itu, meskipun pendapatan memiliki pengaruh, untuk mengurangi kemiskinan harus melibatkan faktor yang lain tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan saja, sehingga pendapatan tidak dapat memoderasi IPM terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah perlu melakukan upaya selain meningkatkan pendapatan, pemerintah juga harus fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kondisi hidup yang layak. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih efektif dalam hubungan pendapatan memoderasi antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan, dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dan melakukan kebijakan yang mendukung berbagai aspek pembangunan manusia, tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan semata. Hal ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dan integrasi program-program pembangunan yang berkelanjutan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat

---

<sup>41</sup> Robiansyah, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara),” *Kinerja* 12, No. 2 (2019): 131–39.

<sup>42</sup> Badgaiyan, “Looking at Human Development Index through the lens of Intensity of Multidimensional poverty and Income.”

<sup>43</sup> Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, dan Hendriana Trifonia Lau, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu,” *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humainiora* 2, no. 7 (2021): 60–84.

menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

##### **5. Pendapatan memoderasi tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2022**

Pendapatan memoderasi tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2022 dengan melalui uji MRA menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hasil uji MRA nilai variabel interaksi 0.0876 lebih besar dari 0.05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak pendapatan tidak mampu memoderasi hubungan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robiansyah (2019) menunjukkan hasil bahwa pendapatan perkapita tidak dapat memoderasi hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.<sup>44</sup>

Muhammad Azis Maulana dan Aan Julia yang menyatakan semakin besar Pendapatan Perkapita yang diperoleh suatu kota, belum tentu dapat mengurangi Tingkat Kemiskinan pada kota tersebut.<sup>45</sup>

Pendapatan di Indonesia belum mampu menjadi faktor moderasi yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh para pekerja. Meskipun terjadi peningkatan jumlah pendapatan dan tenaga kerja, hal ini tidak berarti secara otomatis dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Ini disebabkan oleh pendapatan di Indonesia yang masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan standar negara-negara tetangga. Selain itu, pendapatan yang diterima oleh sebagian besar pekerja di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan peningkatan pendapatan yang ada tidak efektif dalam mengurangi beban kemiskinan.<sup>46</sup> Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan dalam aspek pendapatan dan tenaga kerja, kedua faktor tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.

---

<sup>44</sup> Robiansyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara)," *Kinerja* 12, No. 2 (2019): 131–39.

<sup>45</sup> Maulana, Julia, dan Mafruhat, "Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019."

<sup>46</sup> Rahmi Yulia Putri, Zul Azhar, dan Dewi Zaini Putri, "Analisis Kemiskinan Berdasarkan Gender Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 603–12.

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk meningkatkan upah minimum, memperluas akses terhadap pelatihan keterampilan, dan mempromosikan sektor ekonomi yang berpotensi memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi pekerja. Dengan hasil penelitian ini, pemerintah dapat secara efektif mengatasi tantangan kemiskinan yang masih dihadapi oleh sebagian besar pekerja di Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat pendapatan yang memadai bagi warganya. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan redistribusi pendapatan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar semua orang terpenuhi.

#### **6. Pendapatan memoderasi ZIS terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2022**

Pendapatan memoderasi ZIS terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2022 dengan melalui uji MRA menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hasil uji MRA nilai variabel interaksi 0.0579 lebih besar dari 0.05. hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan tidak dapat berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan ZIS dengan kemiskinan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena pendapatan tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungannya dengan ZIS dan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raid Ghaniyu Putra menyatakan pendapatan perkapita tidak mampu memoderasi ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika seseorang memiliki tingkat penghasilan yang meningkat, maka kemampuan berzakatnya pun seharusnya akan meningkat. Namun, kendala yang terjadi pada saat ini yaitu kurangnya pendidikan yang diperoleh akan berzakat kepada masyarakat yang menjadikan masih kurangnya kesadaran masyarakat muslim akan berzakat yang akan berdampak pada pendapatan yang mereka peroleh sebesar apapun tidak menjamin dapat berpengaruh dalam bertumbuhnya ekonomi di Indonesia.<sup>47</sup> Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muarif Leo dkk yang menunjukkan hasil pendapatan tidak dapat

---

<sup>47</sup> Raid Ganiyu Putra, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Zis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Moderating Tahun 2018-2022," *Uin Salatiga*, 2023.

memoderasi hubungannya dengan variabel lainnya.<sup>48</sup> Serta penelitian dari Kurniati juga menunjukkan hasil pendapatan tidak selalu memoderasi hubungannya dengan variabel independen dengan variabel dependen.<sup>49</sup>

Tingginya pendapatan tidak dapat memoderasi ZIS terhadap kemiskinan karena ZIS yang diperoleh dari Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena program dana ZIS umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang bersifat konsumtif.<sup>50</sup> Oleh karena itu, meskipun ZIS dapat membantu seseorang untuk bertahan hidup, namun tidak cukup untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan.

ZIS tidak dirancang sebagai alat untuk menciptakan peluang ekonomi atau investasi yang dapat membantu penerima manfaat dalam jangka panjang. Karena sifatnya yang konsumtif, ZIS hanya memberikan solusi jangka pendek dan tidak menawarkan strategi atau program yang dapat secara sistematis mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, pendapatan tidak dapat memoderasi hubungan antara ZIS dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah perlu meninjau ulang pendekatan terhadap program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) agar lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, dana ZIS juga harus dialokasikan untuk program-program yang mendukung penciptaan peluang ekonomi dan investasi jangka panjang bagi penerima manfaat. Ini memerlukan peningkatan dalam perancangan program ZIS yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, akses ke modal usaha, dan bantuan teknis untuk membangun usaha kecil dan menengah. Dengan pendekatan yang lebih progresif dan berkelanjutan, ZIS dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengurangi

---

<sup>48</sup> Muarif Leo dkk., “Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating,” *Jurnal Akuntansi* 6, no. 3 (2022): 2796–2807, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953>.

<sup>49</sup> Kurniati, Mohamad Nur Utomo, dan Karunia Erick, “Peran rasio keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan pendapatan perkapita sebagai variabel moderasi,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 19, no. 2 (2023): 359–67.

<sup>50</sup> Wahyu Kurnianingsih, “Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (2022): 153–68, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>.

kemiskinan dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peninjauan ulang terhadap strategi dan pelaksanaan program-program ZIS. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhatikan bahwa alokasi dana ZIS yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang bersifat konsumtif tidak akan memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengarahkan dana ZIS ke program-program yang mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang penggunaan dana ZIS agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan melakukan penyesuaian strategi dan pelaksanaan program ZIS, pemerintah dapat meningkatkan efektivitasnya dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.